

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN REKOMENDASI**

#### **5.1 KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran Bakesbangpol Jakarta dalam pencegahan konflik di Jakarta: studi kasus pilgub DKI Jakarta tahun 2017, maka kesimpulan yang dibuat antara lain:

Pertama, Potensi konflik yang muncul ini disusun berdasarkan deteksi potensi konflik, dan pemetaan faktor penyebab konflik dengan melakukan analisis faktor struktural dan analisis aktor sekuritisasi konflik. potensi konflik pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 meliputi:

Satu, isu SARA dan penistaan agama, walaupun Isu SARA yang menyeruak di masyarakat hanya berkuat pada isu agama dan ras saja serta hanya ditujukan kepada Basuki Tjahja yang merupakan calon gubernur yang beragama kristen dan beretnis Tionghoa.

Dua, Netralitas aparat sipil negara, dikarenakan salah satu pasangan calon yang maju berasal dari petahana dan memberikan kesempatan terjadinya ketidaknetralan pada aparat sipil negara di DKI Jakarta.

Tiga, Profesionalitas penyelenggara pemilu, ditunjukkan dengan terjadinya ketidakprofesionalan KPPS, ketidakmengertian panitia dengan aturan dan SOP pemilihan, bahkan terjadi jumlah pemilih yang tidak sesuai dengan DPT yang dimiliki oleh KPU.

Empat, penyelenggaraan pemilu, ditunjukkan dengan masih terjadinya black campaign, money politik, *hoax* dan *fake news* dan lain-lain.

Lima, Konflik kepentingan dan kekuasaan, merupakan hal mendasar bahwa resiko demokrasi adalah terjadinya konflik yang diakibatkan perbedaan pendapat baik di elit maupun masyarakat.

Enam, kotamadya Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur merupakan daerah yang memiliki tingkat kerawanan konflik yang cukup besar saat pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Kedua, peran badan kesatuan bangsa dan politik pada pencegahan konflik di DKI Jakarta, dalam konteks Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah melakukan upaya pencegahan dan penanganan konflik sosial yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, dan baik mandiri maupun bersinergi. Upaya pencegahan dan penanganan konflik dilakukan dalam bentuk deteksi dini, peringatan dini dan tanggap dini. Peran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam pencegahan konflik pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 meliputi:

Satu, secara struktur, Bakesbangpol DKI Jakarta sejauh ini masih di bawah komando Gubernur DKI Jakarta dan koordinasi dengan Ditjen Polpum Kementrian Dalam Negeri. Selanjutnya dapat dibuat peraturan yang mengatur teknis mengenai mekanisme koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi Bakesbangpol dengan Gubernur dan Kementrian Dalam Negeri demi terwujudnya keamanan nasional.

Dua, upaya deteksi dini belum maksimal dilaksanakan, karena peran FKDM belum optimal diberdayakan.

Tiga, Bakesbangpol memiliki posisi sentral sebagai ketua (*leading sector*) dalam Pos komando bersama pemilihan umum gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Bentuk *leading sector* berupa bersinergi dengan berbagai *stakeholder* lintas sektor terkait pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta di bawah naungan pos komando bersama pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017. Oleh karena itu, Bakesbangpol hanya melakukan tindakan fasilitasi, monitor, dan laporan evaluasi terhadap pelaksanaan pilgub DKI Jakarta, sedangkan instansi yang ada di bawah koordinasi posko bersama pemilihan gubernur DKI Jakarta tahun 2017 melaksanakan tupoksi sesuai tupoksi lembaga masing-masing demi pelaksanaan pemilihan gubernur DKI Jakarta yang aman dan damai.

Empat, masih ada ormas yang tidak terdaftar di bakesbangpol DKI Jakarta sehingga tidak bisa dibina langsung oleh Bakesbangpol DKI Jakarta, seperti ormas FPI.

Lima, koordinasi Bakesbangpol dengan instansi terkait dalam pengawasan kasus penistaan agama yang menyeret Basuki Tjahja sebagai salah satu calon peserta pilgub DKI Jakarta.

Enam, Bakesbangpol melakukan monitoring kepada instansi di bawahnya seperti Walikota/ Bupati serta Bakesbangpol Kota/Kabupaten agar bisa sejalan dengan target pemerintah provinsi dalam menjaga kualitas sosial politik yang kondusif di DKI Jakarta

Tujuh, Bakesbangpol melakukan upaya pencegahan konflik dalam bentuk program sosialisasi, himbauan dan pembinaan masyarakat dengan tema demokrasi yang sehat dan anti SARA sebagai upaya tanggap dini konflik.

Delapan, upaya deteksi dini konflik dilakukan Bakesbangpol berupa mengoptimalkan berbagai forum masyarakat yang berada di bawah kendali Bakesbangpol untuk melakukan deteksi dini konflik di masyarakat bersamaan dengan koordinasi dengan TNI dan Kepolisian. Salah satu forum yang menjadi kaki tangan Bakesbangpol dalam upaya deteksi dini konflik pada Pilgub DKI Jakarta tahun 2017 adalah Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).

## **5.2 REKOMENDASI**

Melihat hasil penelitian yang dilakukan dan kesimpulan yang dirumuskan, maka rekomendasi yang dapat berikan antara lain:

Pertama, vitalnya peran Bakesbangpol dalam proses pencegahan dan penyelesaian konflik khususnya isu pilkada, namun dirasa kurang kajian dan penelitian terkait, diharapkan kajian selanjutnya dapat membahas mengenai politik damai dan resolusi konflik politik dalam konteks pemilihan umum, serta optimalisasi dan evaluasi peran Bakesbangpol DKI Jakarta dalam penanganan konflik sosial di DKI Jakarta.

Kedua, tingkatkan pengawasan dan pengamanan wilayah Jakarta Utara, Jakarta Barat dan Jakarta Timur sebagai wilayah rawan terjadinya konflik politik

dan sosial di DKI Jakarta. Terlebih menjelang pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019.

Ketiga, Pemerintah provinsi beserta seluruh elemen penyelenggara pemilihan umum, harus memperhatikan potensi yang muncul pada pilgub DKI Jakarta agar tidak muncul lagi di gelaran pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019. Misalnya: pemerintah menjamin netralitas aparatur sipil negara sehingga tidak terjadi konflik. Terlebih salah satu pasangan calon yang maju pada pilpres 2019 berasal dari petahana dan memberi kesempatan terjadinya ketidaknetralan pada aparatur sipil negara; Kemudian pemerintah menjamin profesionalitas penyelenggara pemilu, mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam politik Indonesia dan menjaga penyelenggaraan pemilu dari terjadinya *black campaign*, politik uang, *hoax* dan *fake news* dan lain-lain.

Keempat, tingkatkan peran FKDM sebagai intelejen sipil di bawah kendali Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta sebagai instrumen awal deteksi dini di DKI Jakarta. Kemudian berikan pengarahan dari TNI dan Polri tentang kewenangan intelijen sipil agar tidak bersinggungan dengan peran intelijen TNI dan Polri.

Kelima, ormas yang terdaftar dan belum terdaftar harus diberikan pembinaan terencana oleh Bakesbangpol sebagai pembina ormas di wilayah Jakarta, terutama ormas dan kelompok yang tercitrakan intoleran dan sering terlibat kekerasan. Adapun ormas yang belum terdaftar di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta, seperti FPI, harus dilegalkan dalam bentuk surat keterangan, agar terpantau perkembangannya. Terlebih gubernur terpilih merupakan representasi aspirasi kelompok tersebut.

Keenam, secara struktur dapat dibuat satu aturan hukum yang lebih jelas mengenai mekanisme koordinasi antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta dengan Gubernur dan Dirjen Polpum Kementerian Dalam Negeri. Peraturan ini mengatur teknis mengenai mekanisme koordinasi, konsultasi, monitoring dan evaluasi Bakesbangpol dengan Gubernur dan Kementerian Dalam Negeri demi mengantisipasi *missing link* dan terwujudnya keamanan nasional.

Ketujuh, pembentukan Pos Komando Bersama Penanganan Pemilihan Umum tahun 2019 DKI Jakarta. Hal ini melihat hasil sinergi baik yang dibangun pada pelaksanaan pilgub DKI Jakarta, Pos Komando Bersama dapat dilanjutkan untuk mengawal pelaksanaan pemilihan presiden dan pemilihan legislatif tahun 2019.

Kedelapan, pemerintah provinsi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta segera melakukan program rekonsiliasi bagi masyarakat Jakarta setelah terpecah pada pilgub DKI Jakarta tahun 2017 sebelum kembali memanas pada Pilpres dan pileg tahun 2019.

Kesembilan, pemerintah provinsi dapat melakukan pembangunan di Jakarta berlandaskan kemanusiaan, sehingga pembangunan Jakarta dapat terlaksana dengan lebih manusiawi dan meminimalisir korban rakyat yang dirugikan dan sensitif konflik.

Kesepuluh, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta dapat mengembangkan program yang efektif untuk pencegahan perkembangan intoleransi dan radikalisme di Jakarta, terutama di kalangan anak muda baik di sekolah, kampus maupun masyarakat. Terlebih anak muda akan menjadi pemilih pemula pada pemilihan umum tahun 2019.

Kesebelas, pemerintah provinsi harus membangun literasi digital berbasis masyarakat, serta menciptakan konten positif, kontra narasi terhadap konten radikalisme dan intoleransi termasuk dalam konteks pemilihan umum. Juga membuat sistem perlawanan informasi hoax dan *fake news* di media sosial baik mandiri atau bekerja sama dengan penyedia konten digital seperti facebook, google dan lain-lain. Misalnya, program Jabar Saber Hoax yang dilakukan oleh pemerintah provinsi Jawa Barat untuk meminimalisir dan melawan hoax.

Keduabelas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta meningkatkan kualitas program deteksi dini, peringatan dini dan tanggap dini dalam bentuk intensitas rapat rutin koordinasi dengan forum binaan Bakesbangpol. Koordinasi dilaksanakan tidak hanya program tahunan tapi semesteran, bulanan dan juga insidental.

Ketigabelas, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik DKI Jakarta membuat program bela negara dengan menyasar semua kelompok masyarakat Jakarta (tidak hanya elit saja) terutama kelompok yang sempat bersitegang pada Pilgub DKI Jakarta dalam rangka penguatan sumber daya pertahanan negara.